

**HAMBATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Oleh:

SULTHAN DZAKWAN DHAIFULLAH WINDEL

2420832002

Pembimbing:

Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si

Dr. Aidinil Zetra, MA

**POGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sulthan Dzakwan Dhaifullah Windel

No. BP : 2420832002

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Agustus 2026

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulthan Dzakwan Dhaifullah Windel
BP : 2420832002
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Hambatan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Integrasi Pelayanan Publik di Kota Solok." Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyampaikan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padang
Yang Menyatakan,

Pada tanggal: 26 Agustus 2025



Sulthan Dzakwan DW
NIM. 2420832002

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK

NAMA MAHASISWA : SULTHAN DZAKWAN DHAIFULLAH WINDEL
NIM : 2420832002

Telah diuji di depan Dewan Penguji Kelayakan Tesis Program Magister Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Tanggal: 24 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI

Dr. Doni Hendrik, M. Soc, Sc

Ketua Sidang

()

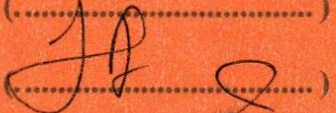
Dr. Tengku Rika Valentina, M.A

Anggota Penguji

()

Dr. Irawati, M.A

Anggota Penguji

()

Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si

Pembimbing I

()

Dr. Aidinil Zetra, M.A

Pembimbing II

()

Padang, 26 Agustus 2026
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



Dr. Jendrius, M.Si
NIP. 19690131199403100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab munculnya hambatan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Solok serta mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian berangkat dari paradoks empiris antara capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Solok yang tergolong sangat baik dengan tingkat adopsi IKD oleh masyarakat yang tetap rendah dan belum memenuhi target nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta masyarakat, dan dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi IKD bersifat struktural dan berlapis pada keempat variabel tersebut, yang keseluruhannya bermuara pada satu akar persoalan yang sama, yaitu ketiadaan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi teknis yang tidak secara eksplisit mewajibkan integrasi IKD di luar Disdukcapil dan memicu fragmentasi domain kebijakan antara ekosistem kelembagaan SPBE yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika dengan ekosistem IKD yang dikelola Disdukcapil secara terpisah, sehingga keberhasilan pada satu domain tidak berkontribusi terhadap domain lainnya. Pemerintah Kota Solok, melalui Disdukcapil, telah melakukan empat kategori upaya, yaitu perluasan jangkauan aktivasi, penguatan regulasi, formalisasi kerja sama kelembagaan, dan inovasi komunikasi publik, namun seluruh upaya tersebut belum mampu mengatasi keterbatasan regulasi lintas sektor dan fragmentasi kelembagaan yang bersifat sistemik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Fragmentasi Kelembagaan, SPBE, Edwards III, Pelayanan Publik, Kota Solok

ABSTRACT

This research aims to analyze the underlying causes of the obstacles in the implementation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) in Kota Solok, as well as to identify the government's efforts in addressing these obstacles. The study departs from an empirical paradox in which Kota Solok's Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) index attained a "very good" rating, while the level of public adoption of IKD remained low and had not met the national target. This research employs an analytical descriptive approach with a qualitative case study method. Data were collected through in-depth interviews with informants from the Department of Population and Civil Registration, the Department of Communication and Informatics, the Regional Secretariat, the One-Stop Investment and Integrated Services Office, the Department of Social Affairs, and members of the public, and were analyzed using George C. Edwards III's policy implementation framework, encompassing the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the obstacles to IKD implementation are structural and multilayered across all four variables, all of which converge on a single root cause: the lack of regulatory synchronization and harmonization in technical regulation that does not explicitly require IKD integration beyond Disdukcapil and trigger the fragmentation of policy domains between the institutional ecosystem of SPBE, managed by Kominfo, and the ecosystem of IKD, managed separately by Disdukcapil, such that success in one domain fails to contribute to the other. The Kota Solok government, through Disdukcapil, has undertaken four categories of effort which are expanding activation outreach, strengthening regulatory instruments, formalizing inter-institutional cooperation, and innovating public communication. However, none of these efforts has been able to overcome the underlying limitations of cross-sectoral regulation and the systemic institutional fragmentation.

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity, Institutional Fragmentation, SPBE, Edwards III, Public Service, Kota Solok